BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suporter merupakan suatu bentuk kelompok sosial yang secara relatif tidak teratur dan terjadi karena ingin melihat sesuatu.¹ Suporter sepakbola merupakan kerumunan di mana diartikan sebagai sejumlah orang yang berada pada tempat yang sama, adakalanya tidak saling mengenal, dan memiliki sifat yang peka terhadap stimulus (rangsangan) yang datang dari luar.²

Kerumunan semacam ini hampir sama dengan khalayak penonton karena adanya pusat perhatian yang sama. Fokus perhatian yang sama dalam kelompok penonton yang disebut suporter dalam hal ini adalah tim sepak bola yang didukung dan dibelanya, apakah mengidolakan salah satu pemain, permainan bola yang bagus dari tim sepak bola yang didukungnya, ataupun tim yang berasal dari individu tersebut berasal.³

Sepakbola merupakan olahraga yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan tanpa memandang kasta dan usia. Selain itu, adanya kemajuan teknologi menyebabkan sepakbola dapat dinikmati dengan mudah oleh masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berbagai faktor tersebut yang menjadikan sepakbola sebagai olahraga yang digandrungi oleh banyak orang dimanapun. Hal ini sejalan dengan bahwa sepakbola mempunyai penonton yang paling banyak dibanding dengan olahraga yang lain.

¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Pengantar Sosiologi*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 81.

² Soeprapto, *Materi Kuliah Sosiologi Hukum*. Universitas Terbuka, Tangerang, 2012, hlm. 32.

³ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm. 93.

Hooligan adalah suporter sepak bola yang brutal ketika klub kesayangannya kalah bertanding. Awalnya kata hooligan merupakan nama bagi suporter sepak bola dari Inggris, namun akhir-akhir ini menjadi fenomena dunia. *Hooliganisme* adalah perilaku nakal dan merusak oleh penggemar sepak bola yang terlalu bersemangat. Tindakan seperti berkelahi, merusak fasilitas umum dan intimidasi. Tidak sedikit dari mereka yang keluar masuk penjara karena sering terlibat dalam sebuah perkelahian.

Tingkah laku dari hooligan yang brutal ketika menyaksikan klub kesayangan mereka kalah telah menjadi gejala sosial dan bahkan dinegara-negara Eropa masalah *hooliganisme* ini sudah masuk kedalam studi pendidikan. Pada awalnya kata *hooligan* ini diberikan oleh media-media Inggris untuk para suporter sepak bola yang melakukan huru-hara. Dan kata hooligan ini diberikan oleh media Inggris ketika 1950-an sepak bola Inggris mengalami kemajuan liga domestik.⁴

Hooliganisme dalam dunia sepak bola di Indonesia yang disebabkan oleh ulah suporter juga terus terjadi. Perilaku ini sering didasarkan pada persaingan antara tim yang berbeda dan konflik dapat terjadi sebelum atau setelah pertandingan sepak bola. Peserta sering memilih lokasi jauh dari stadion untuk menghindari penangkapan oleh polisi, tetapi konflik juga bisa meletus secara spontan di dalam stadion atau di jalan-jalan sekitarnya.

⁴ Hari Wahyudi, *The Land of Hooligan: Kisah Para Perusuh Sepak Bola*, Garasi (Yogyakarta, 2009) hlm. 124.

Salah satu perilaku negatif suporter yang dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adalah perilaku anarkis seperti tindak kekerasan/tawuran antar suporter, perusakan fasilitas umum dan melakukan tindakan kriminal seperti penjarahan di mana perilaku mereka ini tidak hanya merugikan mereka dan klub, tetapi juga berdampak pada masyarakat dengan menyisakan rasa takut/cemas masyarakat terhadap suporter sepakbola hingga masyarakatpun memunculkan stigma terhadap mereka, selain itu kerugian materil akibat kerusuhan suporter dan juga perusakan fasilitas umum tentunya menjadi hal yang sangat disayangkan.

Perilaku suporter sepakbola ini dianggap sebagai wujud masalah sosial dan hukum karena dampak yang ditimbulkannya, baik itu yang berupa fisik seperti perusakan fasilitas umum dan non fisik yakni rasa takut/cemas masyarakat ketika bertemu suporter sepakbola.⁵

Hooliganisme sepak bola dapat berkisar dari teriakan dan perkelahian kecil, kepada kerusuhan besar di mana firma-firma saling serang dengan senjata mematikan seperti botol kaca, batu, pisau, parang dan pistol. Dalam beberapa kasus, perkelahian di stadion telah menyebabkan penggemar melarikan diri dengan panik dan luka-luka disebabkan ketika pagar atau dinding runtuh dari tekanan kerumunan untuk keluar.

Begitu banyak korban yang jatuh semakin menambah buruk citra persepakbolaan, bahkan mengganggu ketertiban umum dan merusak fasilitas

⁵ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 83.

umum sering di lakukan oleh para suporter sepak bola. Yang sangat sering terjadi dan tak bisa dipungkiri adalah bentrokan antar pendukung kedua kesebelasan yang berlaga semakin sulit dihindarkan. Rentetan kejadian ini tentu mengakibatkan kerugian materil dan non-materil yang sangat besar, baik dari sisi suporter maupun masyarakat umum.

Suporter adalah bagian penting dalam sepakbola. Saking pentingnya, hampir semua peraturan organisasi PSSI banyak yang mengatur tentang suporter, salah satunya adalah Peraturan Organisasi PSSI tentang Kode Disiplin PSSI. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan bahwa penegakan disiplin adalah basis untuk meningkatkan kualitas persepakbolaan national.

Dalam hal ini penonton sepak bola memiliki peraturan yang terkait, adapun peraturan yang mengatur penonton sepak bola (suporter) dalam peraturan organisasi kode etik persatuan sepak bola seluruh Indonesia (PSSI) tahun 2010 yakni:

Pasal 1

1) Tujuan

Tujuan dari Kode Disiplin ini adalah untuk memastikan seluruh hal yang terjadi dalam pelaksanaan Kompetisi dijalankan sesuai dengan regulasi serta aturan lain yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas kepada Laws of the Game, manual, circular, directives dan dokumen resmi lainnya.

2) Kode Disiplin:

- a) mendeskripsikan pelanggaran peraturan di dalam regulasi Kompetisi;
- b) menentukan sanksi yang dikeluarkan dalam setiap pelanggaran;
- c) mengatur organisasi dan fungsi badan yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan prosedur yang harus diikuti oleh badan-badan tersebut.

Pasal 3

Ruang Lingkup pelaksanaan: Pribadi dan Badan Hukum

Kode Disiplin ini berlaku terhadap pribadi dan badan hukum sebagai berikut:

- 1) Klub dan afiliasi mereka;
- 2) Oficial;
- 3) Pemain;
- 4) Perangkat Pertandingan;
- 5) Interm ediary;
- 6) Setiap orang yang memiliki otoritas dari GTS, khususnya yang terkait dengan pertandingan, kompetisi atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh GTS; dan
- 7) Penonton.

Akhir-akhir ini sering terjadinya kasus perkara penganiayaan yang dilakukan dengan bersama-sama yang sampai mengakibatkan hilangnya nyawa dari seseorang akibat perselisihan oleh para suporter sepak bola di tiap daerah. Bahwasannya perdamaian itu ajaran yang hakiki pada setiap insan manusia dalam menanggapi situasi kondisi yang sedang mengalami kesulitan menangani suatu permasalahan. Tensi panas yang selalu mengembara dari jiwa para suporter apabila mengetahui dan mendapati suporter lain yang dirasa tidak pernah membawa angin segar dari rasa dendam. Pihak kepolisian pun selalu dibuat pusing dari perlakuan tingkah laku para suporter apabila didalam pertandingan sepak bola dari tim yang didukungnya bila memperoleh hasil yang mengecewakan di pertandingan, tindakan kekerasan pun terwujud dari suporter.

Tindak pidana penganiayaan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang

lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Di samping itu juga tindak kejahatan Hooliganisme dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan.

Dan dapat disangkakan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Seperti diketahui bahwa adanya pemberitaan kasus pengeroyokan suporter diproses secara hukum. Baru-baru ini dihebohkan lagi dengan penyeroyokan yang dilakukan oleh sesama bobotoh Persib karena salah paham sehingga menyebabkan satu korban jiwa meninggal.

Korban yang meninggal dunia atas nama saudara Ricko Andrean (Alm), 22 tahun. Peristiwa itu terjadi ketika babak pertama Persib Bandung melawan Persija Jakarta usai, almarhum Ricko bersama temannya membeli makan.

Sebelum makan, Ricko yang saat itu merasa gerah memutuskan untuk membuka baju viking yang ia kenakan. Saat sedang makan, ada keributan yang diduga The Jak dipukuli oleh oknum suporter. Tempatnya di tribun yang sama tapi di pojok atas tempat almarhum duduk. Merasa penasaran almarhum Ricko spontan lari dan ingin melihat sumber asal keramaian tersebut. Ketika ia menghampiri sumber keributan, target pemukulan oknum yang diduga The Jak bersembunyi di balik badannya. Ricko yang sudah tidak mengenakan atribut Persib, justru ikut dianggap sebagai anggota The Jak dan menjadi korban emosi oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum dipukuli, almarhum Ricko sempat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdomisili di Bandung kepada massa. Sebelum dipukuli dia nunjukin KTP dan bilang "aing orang Bandung, Aing orang Bandung".

Namun karena banyaknya massa yang emosi, pembelaan yang ia berikan pun sia-sia. Dia dipukuli dan menjadi bulan bulanan suporter hingga akhirnya babak belur dan tak sadarkan diri. Beberapa temannya yang sedang makan tidak tahu jika almarhum lari menuju sumber keributan. Ketika sadar ada ribut di atas

barulah mereka tahu bahwa Ricko menjadi korban pemukulan, saat itulah temannya berlarian membantu almarhum. Ricko yang sudah tak berdaya dibawa ke Rumah Sakit AMC Cileunyi. Kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung.

Ricko Andrean Maulana menghembuskan nafas terakhirnya di RS Santo Yusuf Bandung, Kamis (27/7/2017) sekira pukul 10.10 WIB, usai menjalani perawatan intensif selama lima hari. Ia di kebumikan di Tempat Pemakaman Umum Cikutra, Bandung, bersebelahan dengan makam ibu dan bapaknya, Kamis (27/7/2017) sore hari.

Kasus tersebut merupakan sebagian contoh tindak pidana yang terjadi dan membuktikan kepada masyarakat bahwa kekerasan yang melibatkan para suporter sepak bola dapat dikategorikan bagaikan budaya yang tidak akan hilang dan berakhir oleh waktu, hal demikian memang sangat miris untuk didengar, dilihat, dan dirasakan oleh masyarakat umum, dampak yang dihasilkan dari anarkisnya para suporter menimbulkan banyak kerugian yang nyata, terjadi pengrusakan fasilitas umum dan ketidak nyamanan bila di jalanan bertemu dengan kerumunan suporter.

Selain itu dalam kenyataannya meski telah banyak diatur mengenai *hooliganisme*, masih sangat sulit memberantas *hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola, bukan hanya dalam pengamanan untuk mencegahnya tapi penerapan sanksinya masih sulit diterapkan, tidak jarang pelaku lolos dari pengamanan aparat hukum karena banyaknya massa dari para pelaku *hooliganisme*.

Jika seperti itu siapa yang dapat memberi pertanggungjawaban secara penuh, berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ‘HOOLIGANISME’ OLEH MASSA SUPORTER SEPAKBOLA DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pihak-pihak manakah yang harus bertanggung jawab atas *Hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola dihubungkan dengan Pasal 170 KUHP ?
2. Apakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola ?
3. Bagaimanakah upaya dalam menanggulangi *Hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pihak manakah yang harus bertanggung jawab secara penuh atas *Hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola.

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya *Hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola.
3. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis upaya hukum dalam menaggulangi *Hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana dan ilmu pengetahuan kriminologi serta memberikan konsep pemahaman dari sudut pandang yuridis kriminologis terhadap suatu permasalahan yang terjadi khususnya mengenai kasus *Hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan massa supporter sepakbola dan aturan aturan hukumnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan

memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam prakteknya.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum, mahasiswa serta masyarakat dapat mengetahui bagaimana peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi korban yang ditimbulkan dari tindakan *Hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepak bola.

E. Kerangka pemikiran

Indonesia adalah negara hukum sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar negara, dapat diartikan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum, segala sesuatunya diatur dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum bertujuan untuk ketertiban umum agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Adapun yang dimaksudkan di dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah agar setiap perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku

suporter sepak bola merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman.

Asas yang menjadi landasan penelitian menurut hukum positif di Indonesia untuk memperkuat pentingnya penelitian mengenai kasus yang penulis analisis adalah sebagai berikut:

1. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.⁶

Menurut N.J. Smelser tahap tahap yang menyertai terjadinya kekerasan massa ini, yaitu sebagai berikut:

⁶ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 1990, hlm. 1.

1. Berkembangnya prasangka kebencian yang meluas terhadap suatu sasaran tertentu. Sasaran kebencian ini berkaitan dengan faktor pencetus, yaitu peristiwa yang memicu atau mengawali suatu kerusuhan.
2. Mobilisasi massa untuk beraksi, yaitu adanya tindakan nyata dari massa dan mengorganisasikan diri mereka untuk bertindak.
3. Kontrol sosial, yaitu kemampuan aparat untuk mengendalikan situasi justru menjadi sumbu untuk kerusuhan membludak dan semakin tak terkendali.

Suporter sepak bola ini memiliki klasifikasi suporter yang terkenal di dunia. Klasifikasi tersebut ialah:

1. *Hooligan*

Hooligan adalah suporter sepak bola yang brutal ketika klub kesayangannya kalah bertanding. Awalnya *hooligan* merupakan suporter sepak bola dari Inggris, namun akhir-akhir ini menjadi fenomena dunia. *Hooligan* adalah perilaku nakal dan merusak oleh penggemar sepak bola yang terlalu bersemangat. Tindakan seperti berkelahi, merusak fasilitas umum dan intimidasi. Tidak sedikit dari mereka yang keluar masuk penjara karena sering terlibat dalam sebuah perkelahian.

2. *Ultras*

Kata *Ultras* diambil dari bahasa latin yang artinya, di luar kebiasaan. Kalangan *ultras* tak pernah berhenti menyanyi mendengungkan yel-yel tim favorit mereka selama berlangsungnya pertandingan. Mereka juga rela berdiri sepanjang permainan dan menyalakan gas warna-warni (atau yang paling sering kita lihat red flare). Jika anda sering menyaksikan pergerakan

manusia seperti gelombang di dalam stadion atau yang lebih dikenal dengan gerakan *Mexican Wave*, itu adalah instruksi dari *Ultras* yang sangat kreatif kepada pendukung lainnya yang ada di dalam stadion. Karakter mereka temperamental, seperti *hooligan*, apabila timnya kalah bertanding atau diremehkan. Namun, berbeda dengan *hooligan*, tujuan utama mereka adalah mendukung tim, bukan untuk unjuk kekuatan dengan jalan adu fisik. Anggota ultras adalah mereka yang setia dan loyal terhadap tim favoritnya cukup lama.

3. *The VIP*

Bagi mereka, yang penting bukan menyaksikan pertandingan, melainkan agar disaksiakan oleh suporter lainnya. Sebagian besar suporter ini adalah kaum selebritas yang hadir diantara kerumunan orang, selain itu mereka juga pebisnis tingkat tinggi yang menyaksikan pertandingan di tempat VIP demi sebuah gengsi untuk pencitraan diri. Mereka tidak peduli dengan hasil pertandingan kecuali itu akan mempengaruhi bisnis yang digelutinya.

4. *Daddy/Mommy*

Mereka adalah orang-orang yang suka membawa anggota keluarganya ke dalam stadion. Bagi mereka menyaksikan pertandingan sepak bola dalam stadion merupakan sebuah hiburan rekreasi keluarga. Oleh karena itu, biasanya klasifikasi ini hadir ke stadion ketika tiket pertandingan tidak terlalu mahal seperti babak penyisihan. Sebagian besar mereka ini adalah karyawan yang bekerja secara profesional yang gemar terhadap sepak bola

namun tidak terlalu fanatik dan letak duduk mereka di stadion pun biasanya jauh dari para hooligan.

5. *Christmas Tree*

Disebut *Christmas Tree* karena sekujur tubuh mereka dipenuhi dengan atribut klub, mulai dari pin, badge, scraft, jersey, kupluk, topi, corat-coret wajah, beraneka ragam wig, sampai tato yang menghiasi tubuh mereka. Berbeda dengan *hooligan* yang selalu laki-laki, *Christmas Tree* ini bisa saja seorang perempuan yang tampil sendiri-sendiri maupun berkelompok. mereka tidak hanya menyaksikan pertandingan saja, tetapi juga berusaha menunjukkan identitas negara atau kelompok mereka. Mereka biasanya duduk berkelompok di area yang jauh dari *hooligan*.

6. *The Expert*

Sebagian besar adalah para pendiunan yang telah berumur. Mereka tidak sayang menggunakan uang pensiunnya untuk bertaruh. Tidak jarang mereka meneguk berbotol-botol minuman saking tegangnya. Namun *The Expert* ini biasanya hanya tertarik pada pertandingan sekelas pertandingan piala dunia atau piala Eropa bukan pada pertandingan liga. Letak duduk mereka biasanya selalu dekat gawang untuk memudahkan mereka berteriak layaknya seorang pelatih.

7. *Couch Potato*

Mungkin inilah kelompok terbesar dari suporter sepak bola. Mereka ini tipe suporter yang tidak hadir langsung ke stadion namun melalui pesawat televisi di rumah. Klasifikasi ini berasumsi bahwa menyaksikan melalui

televisi lebih nyaman daripada membuang uang untuk sebuah pertandingan yang belum tentu menarik. Akan tetapi jangan salah, meskipun hanya menyaksikan melalui televisi, mereka juga berdandan seolah-olah berada di stadion seperti jersey, bendera, dan atribut lainnya.

Dari beberapa klasifikasi diatas hooligan yang paling sering menjadi sorotan dan pembicaraan masyarakat. Menurut Eric Dunning menyebutkan bahwa *hooliganisme* adalah fenomena perilaku kekerasan yang sedikit banyak berkaitan dengan ranah sepak bola. Ini bisa meliputi konflik fisik antar kelompok suporter, menyerang pemain lawan, merusak fasilitas umum dan kekerasan lainnya yang bersifat brutal. Maka dapat dipastikan bahwa hooliganisme melanggar Undang-undang dasar 1945 yang menjadi dasarkeadilan di Indonesia.

Hooliganisme tidak dapat diartikan dengan satu tindak pidana saja karena dalam perilaku *hooliganisme* terdapat beberapa tindak pidana yang jelas melanggar hukum, dari analisis yang telah dilakukan penulis berpendapat bahwa *hooliganisme* terdiri dari kekerasan massal pada benda dan orang berupa tindakan dan ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan atau akan menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan fisik, serta kematian.⁷

Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa:

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 410

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - 3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan yang “terang-terangan” dan “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan”, terhadap orang atau barang. Juga dalam pasal ini terdapat pemberatan pidana berdasarkan akibat-akibat dari perbuatan kekerasan itu, yaitu akibat berupa luka-luka, luka berat dan kematian (maut). Tetapi, dalam KUHPidana juga dapat ditemukan pasal lainnya di mana terjadi penggunaan kekerasan bersama, yaitu Pasal 358 KUHPidana yang terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab XX (Penganiayaan).

Bunyi Pasal 358 KUHPidana sebagai berikut:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Pasal ini mengancamkan pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”. Sekalipun dalam pasal ini

tidak secara tersurat disebutkan unsur “kekerasan”, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan.

Sedangkan dalam peraturan organisasi kode disiplin PSSI mengatur ketentuan pidana tentang tingkah laku sebagai berikut:

Pasal 61

Tingkaahlaku buruk dengan melakukan penganiayaan

1. Tingkaahlaku buruk dengan melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau dilakukan sekelompok orang terhadap seseorang, pemain, ofisial tim, perangkat pertandingan, penonton, pengurus PSSI baik di Pusat maupun di Daerah dan atau pihak-pihak lain yang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan sepakbola dengan menggunakan kekuatan fisik apapun caranya dengan tujuan merugikan kesehatan atau mengakibatkan cedera baik cedera ringan maupun cedera berat, merupakan perbuatan tidak sportif dan melanggar hak dasar kebebasan individu yang hakiki dan karenanya si pelaku tingkaahlaku buruk itu dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin berdasarkan Kode Disiplin PSSI ini.
2. Pemain yang melakukan tingkaahlaku buruk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, dikenakan hukuman berupa sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sanksi larangan mengikuti 3 (tiga) kali pertandingan. Mengacu ke ketentuan Pasal 32 Kode Disiplin PSSI ini, hukuman ini tidak dapat digabungkan dengan hukuman yang lainnya.
3. Ofisial klub yang melakukan tingkaahlaku buruk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, dikenakan hukuman berupa sanksi denda sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sanksi larangan beraktivitas dalam lingkungan sepakbola sekurangnya 3 (tiga) tahun. Mengacu ke ketentuan Pasal 32 Kode Disiplin PSSI ini, hukuman ini tidak dapat digabungkan dengan hukuman yang lainnya.
4. Setiap orang yang bukan pemain dan bukan pula ofisial klub, yang melakukan tingkaahlaku buruk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) Kode Disiplin PSSI ini, dikenakan hukuman berupa sanksi larangan beraktivitas dalam lingkungan sepakbola sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Dan peraturan pertandingan khusus kompetisi PSSI Divisi Liga Indonesia tahun 2007, dalam pasal 34 ayat (2), yaitu:

“Penganiayaan adalah tindakan atau gerakan dan perbuatan atau perlakuan lainnya yang bersifat menyakiti terhadap fisik manusia, antara lain dengan cara pemukulan, perkelahian, dan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh peserta, official atau pemain terhadap lawan tandangnya, aparat pertandingan (wasit dan instruktur pertandingan) ataupun terhadap pengurus PSSI yang dilakukan baik di dalam maupun di luar lapangan pertandingan”.

Sanksi yang digunakan diatur dalam pasal 34 ayat (7), yaitu:

Ke-1: Terhadap tuan rumah tidak diperkenankan menyelenggarakan satu kali pertandingan berikutnya di stadion tempat penyelenggaraan dan harus memindahkan ke lapangan/stadion lain yang memenuhi persyaratan serta berjarak minimal 100 km dari kota tempat penyelenggaraan pertandingan.

Ke-2: Ketentuan yang dimaksud pada ayat 7 ke (1) seluruh biaya teknis pertandingan menjadi beban tuan rumah ke tempat penyelenggaraan pertandingan yang ditetapkan dalam hukuman.

Ke-3: Pertandingan kompetisi yang diharuskan ke stadion lain pada saat peserta yang dihukum tersebut, bertindak selaku tuan rumah penyelenggara dan harus diselenggarakan pada pertandingan kompetisi berikutnya yaitu pertandingan kompetisi terdekat minimal 7 (tujuh) hari sesudah keputusan komite disiplin PSSI mengenai hal ini diumumkan.

Ke-4: Pertandingan tersebut pada ayat 7 ke (3) di atas penyelenggaraannya akan ditetapkan oleh pengurus PSSI sesuai dengan keputusan Komite Disiplin

Khususnya dalam kasus “*brutalisme massa*” seperti terurai diatas sebenarnya yang paling dirugikan adalah sistem hukum yang sudah dibangun karena kepastian hukum akan sangat sulit ditegakkan. Para pelaku merasa dirinya benar dan tidak jarang mereka menentang aparat untuk menangkapnya. Semakin

tak terkendali akibat dari adanya aparat hukum yang tidak bertindak cepat dan tegas, maka dalam kondisi yang demikian kepastian hukum menjadi kehilangan makna. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu sering terkesan aparat hukum sengaja membiarkan begitu saja para perusuh “melampiaskan” hasratnya melakukan perusakan dan berbagai kekerasan lainnya, seolah-olah aparat hukum ingin menghindari dari terjadinya bentrok dengan para pelaku karena banyaknya jumlah massa tidak sebanding dengan jumlah petugas. Kemudian untuk menutupi “kelemahan” tersebut direayasa sebuah dasar pembenaran, padahal sesungguhnya apapun alasannya hal tersebut berakibat fatal bagi hubungan aparat hukum dengan masyarakat yang diayominya, yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat pada aparat hukum. Dan pada gilirannya akan menghilangkan pula kewibawaan hukum, karena aparat hukum merupakan salah satu bentuk dari perwujudan hukum itu sendiri.⁸

Dengan kendala yang terurai diatas, maka harus adanya sistem hukum yang mengatur tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang terorganisir seperti *hooliganisme* yang dilakukan oleh massa suporter sepakbola jika pertanggung jawaban secara individu sudah tidak dapat diaplikasikan dalam kenyataan dilapangan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penyimpangan norma-norma dan nilai, baik yang diatur dalam hukum pidana maupun yang tidak diatur, khususnya perilaku yang karena sifatnya sangat merugikan manusia dan masyarakat serta memperoleh pemahaman reaksi sosial terhadap

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 422.

penyimpangan itu penulis menggunakan beberapa teori kriminologi sebagai berikut:

1. Teori *Anomie*

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani 'a': 'tanpa', dan 'nomos': 'hukum' atau 'peraturan'.

Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakatnya. Keadaan ini berarti tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan oleh orang itu, keadaan masyarakat tanpa norma (*normlessness*) ini lah yang menimbulkan perilaku *deviate* (menyimpang).⁹

Seperti yang dilakukan para suporter sepak bola sekarang tidak merasa melakukan kesalahan pada saat mereka merusak fasilitas umum dan melakukan intimidasi pada orang lain yang tanpa sadar sebenarnya mereka sangat mengganggu ketertiban umum. Karena sangat mementingkan apa yang mereka cintai seperti club ataupun pemain sepak bola yang mereka bela merasa dirugikan membuat mereka tak mementingkan aturan dan norma yang telah ada.

2. Teori Kontrol Sosial

Perspektif kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk menjelaskan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada

⁹ Ibid, hlm. 86.

lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kalangan bawah cenderung melanggar hukum karena merasa terikat dengan peraturan yang konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional, sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial dari putusanya ikatan, seseorang akan merasa bebas untuk menyimpang.

Dengan teori ini penulis akan mencari penyebab dari para supporter sepak bola yang menyimpang dengan cara *hooliganisme* dan merasa bangga karena beralasan demi club yang mereka bela dan cintai.

3. Teori *Labeling*

Teori *Labeling*, merupakan teori untuk mengukur mengapa terjadinya kejahatan, metode yang digunakan dalam teori ini adalah “*self report*”, atau melakukan interview terhadap pelaku yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh polisi. Pembahasan *labeling*, terfokuskan pada dua tema, yakni:

- 1) Menjelaskan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label;
- 2) Pengaruh atau efek dari label tersebut, sebagai suatu konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan.¹⁰

Dengan teori ini penulis akan melakukan interview pada teman yang menjadi anggota *hooligan* didaerah bandung baik yang tidak pernah tertangkap oleh pihak berwajib maupun yang pernah ditangkap dan mencari tahu mengenai

¹⁰ Ibid, hlm. 108.

ciri, faktor penyebab, bahkan efek yang akan ditimbulkan yang berkaitan dengan *hooligan*.

Dengan kerangka pemikiran diatas maka sangat pentinglah penelitian ini untuk memecahkan masalah dari ketidak selarasan *dass sollen* (harapan) dan *dass sein* (kenyataan) yang tertera diatas.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti perlu melakukan tahapan-tahapan penelitian yang sesuai dengan metode dan sistematika penelitian yang benar, berikut pengertian penelitian hukum menurut **Soerjono Soekanto**, dalam bukunya **Pengantar Penelitian Hukum** menjelaskan bahwa:

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudia mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan”.¹¹

Penelitian pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan dan dikejar oleh orang-orang berbakat mengangumkan dengan tingkat komitmen luar biasa.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Airlangga, Jakarta, 2008, hlm.3.

Penelitian juga merupakan pengalaman yang merangsang dan memuaskan bagi banyak orang melalui sokongan pemikiran terlatih dan rasa ingin tahu.¹²

Untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.¹³ *Yaitu tentang Hooliganisme* suporter sepak bola dihubungkan dengan kitab undang-undang hukum pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁴ Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan

¹² Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformative-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 3.

¹³ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 97-98.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10.

deduktif atau bersifat deduksi karena penalarannya bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum.¹⁵

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

1) Bahan-bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-undang Dasar 1945 amandemen keempat;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c) Peraturan Organisasi Kode Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Tahun 2008

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, tulisan, majalah, dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder itu juga termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan hooligan dan kekerasan massa.

3) Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dan memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus dan opini-opini di surat kabar, majalah maupun internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-

keterangan yang akan di olah dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*).

a. Studi kepustakaan (*library research*)

Teknik ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normative dimana pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, skunder dan yang lainnya, yang kemudian disusun menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi lapangan (*field research*)

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti dan mengolah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara keberbagai pihak yang berhubungan langsung dengan para *hooligan* baik pihak berwajib, organisasinya, bahkan para *hooligan* itu sendiri.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan yaitu alat tulis, buku catatan, laptop, dan flashdisk dengan

¹⁶ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 15.

mempelajari terlebih dahulu materi-materi dalam literature, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan berupa wawancara dengan instansi-instansi yang terkait, sekretariat salahsatu suporter sepak bola, dan organisasi yang menaunginya mengenai permasalahan-permasalahan yang dikaji oleh penulis.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif.¹⁷ Kualitatif karena seluruh data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas,¹⁸ tanpa menggunakan angka-angka, table-tabel maupun rumus statistik.

7. Lokasi Penelitian

Data dalam penulisan hukum diperoleh dari berbagai perpustakaan dan instansi pemerintah, diantaranya sebagai berikut :

a. Penelitian Perpustakaan

¹⁷ Elli Ruslina dkk., *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2004, hlm. 98.

¹⁸ Ibid, hlm. 116.

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Bandung;
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No.5, Bandung.
- b. Instansi yang terkait
 - c. Sekretariat suporter sepak bola
 - d. Kantor pengurus cabang PSSI Bandung

G. Sistematika Penulisan

1. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.
2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu:
 - 1) BAB I: Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.
 - 2) BAB II: Landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
 - 3) BAB III: Memuat data yang diperoleh dari penelitian, dapat berupa data sekunder maupun data primer, atau merupakan gabungan keduanya.
 - 4) BAB IV: Memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis, memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka, dan

memfokuskan kepada upaya-upaya untuk menjelaskan dan menjawab identifikasi masalah secara lengkap dan terarah.

- 5) BAB V: Berisi simpulan hasil dan saran serta hasil penelitian.
3. Bagian akhir skripsi: terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.¹⁹

¹⁹ Elli Ruslina dkk., *Panduan Penyusunan Penulisan Hukum (Tugas Hukum)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2004, hlm. 21.